

OPTIMIZING THE ROLE INSTITUTE OF FOREST VILLAGE (LMDH) AND  
ACCELERATION CERTIFICATION PROGRAM IN EKOLEBEL  
PERUM PERHUTANI IN EAST JAVA

Murgianto, Sukarno, and Sugiono,  
2011

Research Centre for Population and Environment  
LPPKM University August 17 1945 Surabaya

Abstract

One way to implement sustainable forest management is through a process of certification is internationally known as the Certification Ecolabel. The certification program will be able to run very well if it had the support of communities around the forest and are already incorporated in the organization LMDH. The LMDH's supporting toward certification program will accelerate the implementation of the ecolabel certification program in forest caretaker unity (kesatuan pemangku hutan/KPH) Perum Perhutani office in East Java. The research method used is using a purposive random sample of 23 KPH in East Java was chosen 3 KPH analysis used is the mean test pairs. The study results showed that LMDH Beginner, Medium and LMDH seeded at KPH strongly support certification programs that are being or will be. This is evident from the test results mean paired difference in KPH Madiun, Ngawi and Bojonegoro located in the departure area accepted which means there is no difference among the three types of LMDH in support of the certification program.

Key words: Optimization LMDH

*UN Climate Change Conference* tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali (Indonesia) salah satunya membahas tentang peranan hutan sebagai pengendali perubahan iklim melalui penyerapan carbon. Berdasarkan hasil Konferensi Para Pihak Ke-13 dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tersebut, terdapat program 'Perdagangan Karbon' yang melibatkan berbagai pihak antara lain masyarakat lokal, LSM, Swasta dan Lembaga Internasional. Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick pada tanggal 11 Desember 2007 di Bali telah meluncurkan *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)*. Dana yang diluncurkan sejumlah 160 juta USD dari 300 juta USD yang direncanakan (di mana sejumlah 100 juta USD untuk program *redded mechanism* dan sejumlah 200 juta USD untuk program *carbon finance mechanism*). Pembiayaan ditujukan kepada upaya jangka panjang berkesinambungan pada konservasi dan pengembangan masyarakat di hutan tropis. Dana tersebut juga disiapkan untuk mendanai mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi fungsi hutan Berdasarkan luasan kepemilikan hutan, Indonesia termasuk pangsa pasar program pendanaan (*carbon finance mechanism*) tersebut, namun mengingat Indonesia bersama Brazil adalah penyumbang 70-80% emisi akibat deforestasi dan degradasi fungsi hutan maka terdapat kekhawatiran (Kompas, 12 Desember 2007:13). Untuk itu Indonesia masih harus menyiapkan

manajemen dan sumber daya manusia (SDM) internal sedemikian rupa sehingga masyarakat desa hutan tidak menjadi 'korban ganda' (Korban akibat deforestasi dan korban terabaikan akibat program penjualan karbon tersebut). Salah satu usaha adalah penggalakan program pengelolaan hutan lestari.

Pengelolaan hutan secara lestari (ekonomi, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan) dapat diwujudkan melalui optimalisasi keterlibatan para pihak. Agar pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kaidah kelestarian, diperlukan pengakuan dari pihak ketiga yang independen, kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak secara global (internasional). Salah satu cara adalah melaksanakan Pengelolaan Hutan Lestari melalui proses sertifikasi secara internasional yang dikenal dengan Sertifikasi Ekolebel. Sejak tahun 1992 telah terjadi pergeseran nilai-nilai di masyarakat internasional, khususnya masyarakat Eropa terhadap produk-produk sumberdaya hutan yang beredar di pasar global. Khususnya para *green buyers* (kelompok yang peduli terhadap kerusakan hutan) menghendaki produk hutan yang dipergunakan berasal dari sumber yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian. Diharapkan kelak *green buyers* menjadi penghapus pasar kayu *illegal*.

Perum Perhutani sebagai BUMN (sejak tahun 1972 diserahi untuk mengelola sumber daya hutan/SDH di Pulau Jawa dan Madura kecuali DKI Jakarta DIY Yogyakarta, dan hutan konservasi), berpartisipasi aktif mendorong diterapkannya Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Perum Perhutani. Sehubungan dengan itu telah terbit Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 090/KPTS/DIR/2006 tentang Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari di Perum Perhutani tanggal 22 Februari 2006. Sedangkan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur telah membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Skema *Forest Stewardship Council* (FSC) yang berisikan Indikator Penilaian. Indikator tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) prinsip sebagai Standard Pengelolaan Hutan Lestari skema FSC yang diterapkan di Perum Perhutani (termasuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur). Sepuluh prinsip tersebut merupakan penjabaran dari 3 (tiga) sasaran pokok (aspek) dari sertifikasi yaitu: produksi (ekonomi), lingkungan, dan sosial kemasyarakatan.

### **Metode Penelitian.**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan kuesioner, wawancara terstruktur, dan studi dokumenter. Penelitian dilaksanakan dengan penahapan sbb: (i) Tahap pertama adalah *matching antara* prinsip-prinsip yang terkandung dalam program sertifikasi ekolebel yang telah diterjemahkan dalam bentuk indikator penilaian pada petunjuk pelaksanaan, **dengan** aktivitas yang senyatanya dilakukan oleh para prayasawana (petani hutan) sebagai anggota LMDH dalam mengikuti

program PHBM. *Matching* ini dilakukan dengan menggunakan Uji Hipotesis Beda Dua Mean Untuk Observasi Berpasangan untuk menemukan letak disinkronisasi antara kecenderungan perilaku petani hutan dengan sasaran program sertifikasi ekolebel sekaligus sebagai upaya pencapaian tujuan akhir dari Pengelolaan Hutan Lestari.; dan (ii) Tahap Kedua adalah penciptakan Program Komputasi Sertifikasi Ekolebel untuk memfasilitasi pemerolehan dan pengolahan data 10 (sepuluh) prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan Standar *Forest Stewardship Council* (FSC) secara akurat dan akseleratif.

### **Hasil dan Pembahasan.**

Terdapat 23 (dua puluh tiga) unit kerja manajemen yaitu Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) pada Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikasi PHL atau Ekolebel. Berdasarkan perencanaan, sejumlah 23 KPH Perum Perhutani Unit II Jawa Timur harus tuntas mendapatkan sertifikasi PHL atau ekolebel pada tahun 2015. Mengacu kepada data dan rencana tersebut, tampaknya perlu adanya strategi akselerasi dalam pencapaian target. Di samping itu, terdapat indikator (dari sepuluh indikator yang ada) atau criteria, yang pemenuhannya memerlukan peran serta dari pihak di luar Perum Perhutani yaitu indikator 'Hubungan Dengan Masyarakat Sekitar'. Pemenuhan indikator yang terkait dengan masyarakat sekitar tersebut sebagai konsekuensi dari paradigma yang dianut oleh Perum Perhutani saat ini yaitu *Community Based Forest Management* (CBFM), meninggalkan paradigma *State Based Forest Management*. Sebagai konsekuensinya adalah dalam mencapai sasaran *internal corporate* yaitu maksimalitas produksi, Perum Perhutani harus menyertakan keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan. Sehingga sejak tahun 2001 telah digulirkan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) adalah organisasi formal sebagai media kerjasama masyarakat dengan Perum Perhutani. Keberhasilan kinerja Perum Perhutani sebagian di antaranya dipengaruhi oleh kinerja LMDH tersebut, termasuk dalam pencapaian atau pemenuhan criteria dalam sertifikasi ekolebel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun pertama Nomor SP2H: 100/SP2H/PP/DP2M/III/2010, tanggal 01 Maret 2010 DIPA Nomor: 0041/023-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, ternyata pemenuhan kriteria dalam sertifikasi ekolebel oleh Perum Perhutani telah mendapat dukungan dari LMDH. Dengan kata lain Perum Perhutani berhasil menyiapkan bukti-bukti yang menjadi indikator penilaian dalam sertifikasi ekolebel terdukung oleh LMDH melalui peran mereka yang cukup optimal dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut. Secara rinci hasil penelitian tersebut adalah sbb.:

Penelitian dilakukan di 3 wilayah dari 23 kesatuan pemangku hutan (KPH) di Jawa Timur yaitu: (1) KPH Madiun mewakili unit kerja manajemen yang telah dinilai untuk memperoleh Sertifikasi Ekolebel, (2) KPH Bojonegoro mewakili unit kerja manajemen yang mempersiapkan untuk dinilai, dan (3) KPH Ngawi mewakili unit kerja manajemen yang belum mempersiapkan untuk dinilai. Pada ketiga daerah tersebut dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai peran lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) terhadap program Sertifikasi Ekolebel antara LMDH berkriteria Ideal dengan LMDH yang ada (sampel). Adanya perbedaan nilai mengindikasikan perlunya upaya optimalisasi peran LMDH pada program tersebut. Nilai peran LMDH tercakup dalam 3 dari 10 indikator pengukuran kinerja Perum Perhutani pada program sertifikasi ekolebel yakni menyangkut: (1) hak-hak masyarakat adat, (2) hak-hak pekerja, dan (3) pelaksanaan pengelolaan yang baik terhadap partisipasi LMDH dalam menjaga kerusakan hutan.

Hipotesa yang ditetapkan berbunyi: “Ada perbedaan antara nilai peran LMDH sampel dengan nilai peran LMDH ideal” Daerah penerimaan hipotesis ( $H_0$ ) dengan  $\alpha = 0,05$  adalah  $-2,04 \leq t \leq 2,04$  dan daerah penerimaan  $H_1$  adalah  $t > 2,04$  atau  $t < -2,04$ . Berdasarkan hasil analisis ternyata adalah sebagai berikut:

(1) **KPH Madiun.** Berdasarkan perhitungan  $t$  hitung = -18, terletak pada daerah penolakan hipotesis, berarti tidak ada perbedaan Peran LMDH pada unit kerja manajemen yang telah dinilai untuk memperoleh sertifikasi ekolebel yaitu KPH Madiun dengan peran LMDH ideal, artinya LMDH se KPH Madiun telah berperan dalam program sertifikasi ekolebel di wilayah tersebut. Terbukti KPH Madiun telah mendapat Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Skema *Forest Stewardship Council* (FSC), meski diperoleh dengan waktu relatif lama yakni mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan;

(2) **KPH Bojonegoro.** Berdasarkan perhitungan  $t$  hitung = -3,6 masih terletak pada daerah penolakan hipotesis, berarti tidak ada perbedaan peran LMDH pada unit kerja manajemen yang sedang mempersiapkan dinilai untuk memperoleh sertifikasi ekolebel ini dengan peran LMDH ideal, artinya LMDH se KPH Bojonegoro telah berperan dalam persiapan program sertifikasi ekolebel di wilayah tersebut.; dan

(3) **KPH Ngawi.** Berdasarkan perhitungan  $t$  hitung = -12, terletak pada daerah penolakan hipotesis, berarti tidak ada perbedaan peran LMDH pada unit kerja manajemen yang belum mempersiapkan dinilai untuk memperoleh sertifikasi ekolebel, dengan nilai peran LMDH ideal, artinya LMDH se KPH Ngawi telah berperan dalam menyongsong persiapan program sertifikasi ekolebel di wilayah tersebut.

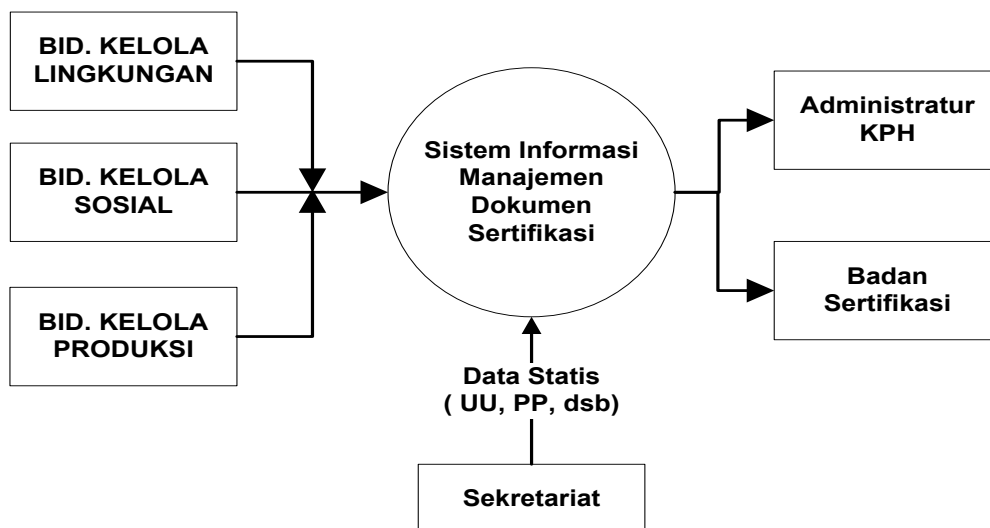
Tidak adanya perbedaan nilai peran antara LMDH sampel dengan LMDH ideal artinya peran LMDH sudah seperti yang diharapkan (idealnya) karena beberapa faktor yakni: (1) peserta LMDH sudah lama bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam pelaksanaan program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan mereka telah sepakat untuk mensukseskan kelestarian hutan, (2) peserta LMDH sering mengikuti sosialisasi bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan PHBM dan dibentuknya LMDH adalah untuk mewujudkan hutan lestari baik untuk kepentingan ekonomi maupun konservasi lingkungan.

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa Perum Perhutani berencana melakukan sertifikasi ekolebel untuk 23 unit kerja manajemen se Jawa Timur yang diharapkan selesai tahun 2015. Hingga tahun 2009 pelaksanaan sertifikasi tersebut baru mencapai 3 kesatuan pemangku hutan (KPH) sebagai unit kerja manajemen. Salah satu kendala dalam proses sertifikasi adalah pengelolaan data terutama data yang termasuk dokumen dinamis belum dapat dikelola secara memadai karena program komputasi yang digunakan masih sangat sederhana (bahwa apa yang dimiliki dan dipergunakan bukan program melainkan catatan administratif yang dituangkan dalam bentuk *softcopy* dengan fasilitas *Microsoft Office Excell Worksheet* yang belum dapat menjalankan fungsi sebagai program komputasi. Pengelolaan data yang akurat dan memiliki akselerasi tinggi sangat diperlukan demi efisiensi dan efektivitas kerja semua pihak yang terkait baik pada tataran lapangan hingga tataran puncak manajemen. Program komputasi sertifikasi ekolebel harus dapat memfasilitasi Perum Perhutani dalam memonitor, menemukan informasi akurat, mendeteksi penyimpangan, menemukan solusi, dan mempercepat tindak lanjut atas sasaran-sasaran apa yang hendak dicapai secara optimal, cepat, tepat dan mudah, dalam hal kelola produk, kelola lingkungan dan kelola sosial. Program komputasi harus dapat mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kesatuan pemangku hutan (KPH) di tingkat kabupaten, Unit Perum Perhutani di tingkat propinsi, dan Direksi Perum Perhutani di tingkat pusat. Telah dicanangkan oleh Perum Perhutani (Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 090/KPTS/DIR/2006 tanggal 22 Februari 2006) bahwa monev di tingkat KPH (sebagai unit kerja manajemen) 1 (satu) kali dalam sebulan, di tingkat Unit 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan di tingkat direksi 6 (enam) bulan sekali. Dengan program komputasi ini dipastikan monev secara *soft information* dapat dilakukan setiap saat, sedangkan bukti fisik pun dapat divisualkan melalui *motion movies or motion video*, serta komunikasi dapat dilakukan dengan *teleconference* kelak.

Untuk mendapatkan Sertifikasi PHL (Pengelolaan Hutan Lestari) dengan Standar *Forest Stewardship Council* (FSC) perlu 10 prinsip pengelolaan. Setiap prinsip memiliki

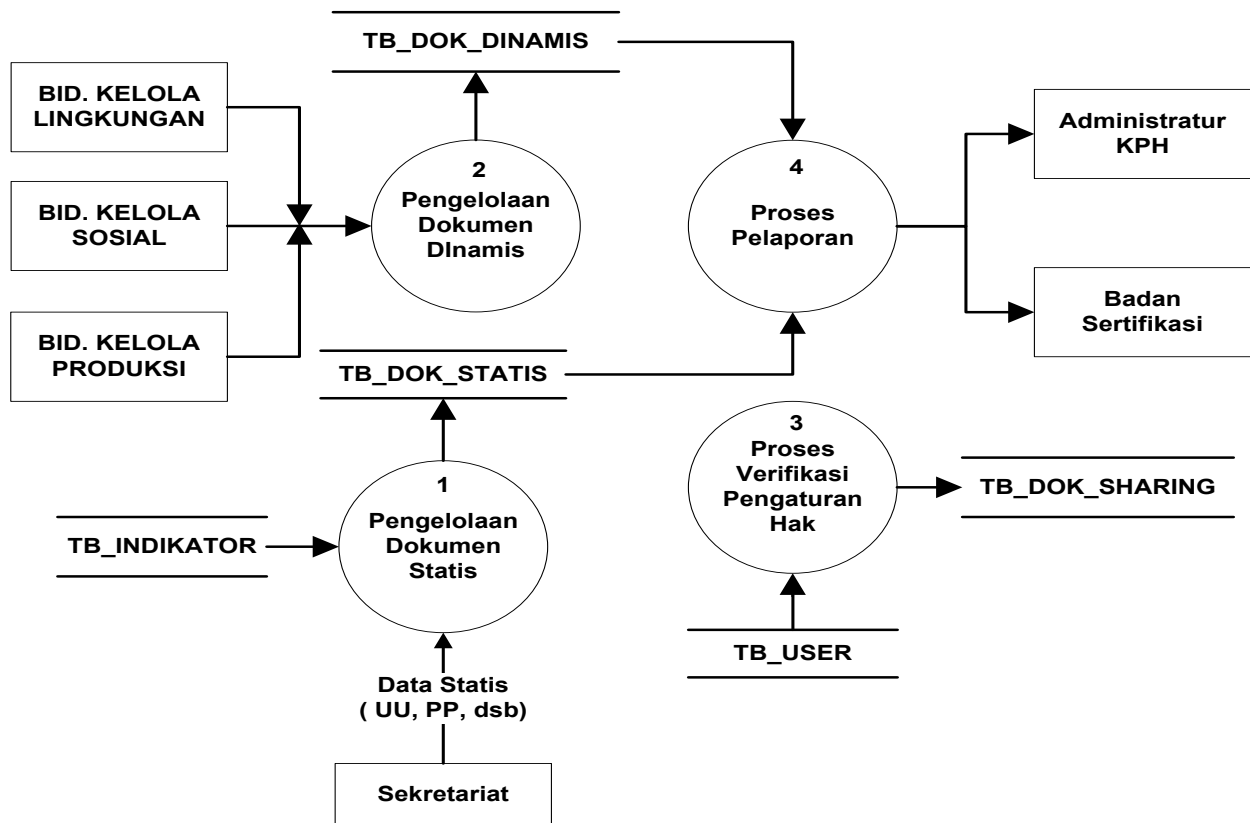
beberapa kelompok indikator, setiap kelompok indikator memiliki beberapa indikator. Setiap Indikator diperlukan diskripsi indikator dan program pemenuhan atau tindakan. Setiap pemenuhan atau tindakan harus didukung oleh bukti objektif yang dapat berupa dokumen statis dan dokumen dinamis. Dokumen statis bisa berupa Visi, UU, PP dan sejenisnya. Dokumen dinamis bisa ada setiap bulan, tri bulan, atau tahunan baik berupa rancangan, kemajuan, monitoring/evaluasi, serta laporan akhir. Laporan bisa berupa word, excel, PDF, Foto, dan Video. Dokumen dan laporan tersebut diusahakan oleh organisasi KPH yaitu bidang kelola Produksi, bidang kelola Sosial, dan bidang kelola Lingkungan. Setiap bidang dapat mengadakan beberapa dokumen untuk beberapa indikator. Ada juga suatu dokumen yang bisa dibagi pakai bersama bidang kelola lain secara aman.

Program komputasi sertifikasi ekolebel sebagai invensi yang diciptakan ini merupakan rekayasa teknologi informasi yang temuan dasarnya telah digunakan diberbagai kepentingan dalam pengelolaan data, namun untuk pengelolaan data sertifikasi ekolebel yang digabungkan dengan Standar *Forest Stewardship Council* (FSC) adalah baru pertama kali di Indonesia. Lebih lanjut penjelasan dalam bentuk context diagram adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Context Diagram SIM Sertifikasi Ekolebel atau Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Dari Context Diagram tersebut di atas terdapat empat proses utama yaitu Pengelolaan Dokumen Statis, Pengelolaan Dokumen Dinamis, Proses Verifikasi dan Pengaturan Hak, serta Proses Pelaporan seperti tampak pada gambar berikut;



Gambar 2. DFD Level 1 SIM Sertifikasi Ekolebel atau PHL

Selanjutnya dari Data Flow Diagram (DFD) tersebut diturunkan struktur database dan *user interface* pada SIM yang dibangun yaitu meliputi 15 Tabel dan 13 Menu *user interface*

## Penutup

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (i) unsur yang paling mendukung dari 10 program sertifikasi adalah unsur yaitu yang menyangkut hak-hak masyarakat adat, hak-hak pekerja dan pelaksanaan yang baik terhadap partisipasi LMDH dalam mempertahankan kelestarian hutan; dan (ii) program komputasi sertifikasi ekolebel sebagai invensi yang diciptakan ini merupakan rekayasa teknologi informasi yang temuan dasarnya telah digunakan diberbagai kepentingan dalam pengelolaan data, namun untuk pengelolaan data sertifikasi ekolebel yang digabungkan dengan Standar *Forest Stewardship Council* (FSC) adalah baru pertama kali di Indonesia. Program yang diciptakan ini di samping mampu dalam pengelola data yang akurat, optimal dan berakselerasi tinggi juga dapat diandalkan dalam proses monitoring dan evaluasi setiap saat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BUMN Online Development. 2002. *Community Based Forest Management*. Up Grade Sistem Manajemen Mutu PT Perhutani. ( 1 Januari 2000)
- Center for Economic and Social Studies, dan Overseas Development Institute. *Program Sertifikasi*. (<http://us.oneworld.net>)
- Closkey, David Mc. *Ecology and Community: The Bioregional Vision*. <http://www.columbiana.org/bioregions.htm> (21 Maret 2005)
- Handoko, V. Rudy dkk. 2009. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Sosial Secara Sinergis-Adaptif-Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi DELEGASI*. No. 2 Tahun VIII. Mei-Juni-Juli-Agustus 2009
- Lembaga Ekolabel Indonesia. *Telah diluncurkan : Aliansi Pendukung Sertifikasi PHBML 29 November 2006*. Copyright © 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia. [www.linknolimit.com](http://www.linknolimit.com)
- PERHUTANI. 2005. *Sertifikat Ecolabeling*. [www.perhutani.co.id/sertifikasi.html](http://www.perhutani.co.id/sertifikasi.html)
- Sabarudi, Maman Mansyur Idris, Budiman Achmad dan M. N. Iman. *Community forestry for poverty reduction-lessons learned in Indonesia*. [www.fao.org/007/ad511e/ad511e0e.htm](http://www.fao.org/007/ad511e/ad511e0e.htm)
- San Arif Awang. *Model Formasi Sosial dan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Indoensia*. <http://www.damar.or.id/artikel/modelformasisosial/index.php>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007
- Sukarno dkk., 2010. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Intensitas pendidikan Kewirausahaan Demi Keberlanjutan Program Hutan Sosial di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur *Jurnal Ilmu Administrasi DELEGASI*. ISSN: 1829-6866 Agustus 2010 No. 2 Tahun IX hal 243-249
- Wahyu F. Riva. *Riniasi Sertifikat PHBML: Sebuah Pengakuan Kelola Hutan Berbasis Masyarakat?* 20 Agustus 2004 Copyright (c) 2003 by Lembaga Ekolabel Indonesia.